

HUKUM ADAT BIAK

Diterbitkan oleh :
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
Tahun 2010

HUKUM ADAT BIAK



Tim Penulis :

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni SH., M.Hum.

Dr. E. Sundari, SH., M.Hum.

Anny Retnowati, SH., M.Hum.

Y. Hartono, S.H., M.Hum.



Diterbitkan oleh :

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Tahun 2010

HUKUM ADAT B I A K

Tim Penulis :

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni SH., M.Hum.

Dr. E. Sundari, SH., M.Hum.

Anny Retnowati, SH., M.Hum.

Y. Hartono, S.H., M.Hum.

Diterbitkan oleh

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Tahun 2010

HUKUM ADAT BIAK

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, November 2010

Tim Penulis:

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni SH., M.Hum.

Dr. E. Sundari, SH., M.Hum.

Anny Retnowati, SH., M.Hum.

Y. Hartono, S.H., M.Hum.

Diterbitkan oleh

BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Hak Cipta pada penulis

Hak penerbitan pada penerbit

Tidak boleh direproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

PRA KATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya, hingga buku tentang Hukum Adat Biak ini dapat diselesaikan dengan lancar. Penulisan buku tentang hukum adat di Indonesia cukup banyak, akan tetapi penulisan buku tentang Hukum Adat di Papua masih terbatas. Hal tersebut salah satunya disebabkan hukum adat di Papua sendiri belum banyak diteliti eksistensinya.

Buku Hukum Adat Biak ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di Biak Propinsi Papua. Buku Hukum Adat Biak penting dipublikasikan, sebagai salah satu bentuk dokumentasi dari eksistensi hukum adat yang pada umumnya berbentuk lisan. Dokumentasi dalam bentuk buku penting dilakukan, agar hukum adat Biak yang di dalamnya tersirat kearifan-kearifan lokal bagi pedoman perilaku masyarakat, tidak hilang ditelan waktu. Sifat hukum adat yang tidak tertulis di satu sisi mempunyai kelemahan, yakni dapat hilang apabila tidak disosialisasikan kepada generasi penerus masyarakat adat. Kekhawatiran bahwa generasi muda akan melupakan hukum adat dari nenek moyang mereka, memunculkan gagasan untuk melestarikannya melalui penelitian dan upaya mendokumentasikannya dalam bentuk buku.

Dengan adanya penulisan laporan hasil penelitian ke dalam bentuk buku tentang hukum adat yang sifatnya tidak tertulis, diharapkan hukum adat menjadi tidak cepat hilang, selalu dijaga kelestariannya dan dapat tercipta kepastiannya. Hukum Adat yang mengandung nilai-nilai yang merupakan kearifan lokal dapat dipertahankan dan dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat setempat pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Penulisan buku tentang hukum adat yang baik akan membantu generasi muda untuk mengingat-ingat dan mengetahui hukum adat dari nenek moyang mereka. Dengan mengetahui hukum adat, diharapkan generasi muda masyarakat adat dapat melestarikannya dan bilamana diperlukan mengembangkannya.

Penulisan buku tentang hukum adat Biak ini meliputi penulisan tentang bidang hukum ketatanegaraan, kedewasaan, hukum kekerabatan, hukum waris, hukum pertanahan serta hukum delik adat di beberapa wilayah masyarakat hukum adat di Biak, yakni masyarakat adat pulau Numfor, Biak Utara, Biak

Timur, Yendidori, dan Biak Barat. Biak merupakan sebuah Kabupaten yang mempunyai satu suku yakni suku Biak dan hukum adatnya pada dasarnya sama. Variasi yang ada sifatnya tidak prinsip, sehingga kajian tentang hukum adat di lima wilayah masyarakat hukum adat dapat dikatakan mewakili hukum adat Biak secara keseluruhan.

Bahan tentang hukum adat yang ditulis dalam buku ini bersumber dari observasi, studi dokumen serta wawancara yang mendalam dengan masyarakat adat Biak. Untuk itu pada kesempatan ini sekaligus ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dortinus Rumbarar, Yusuf Manpioper, Herkanus Kapisa, Demianus Wanma selaku nara sumber; kepada Bapak Hengky Mandosir, Alfius Adadikam, Andareas Marei, Agus Filma, Oktofina Manggara sebagai pengarah lokasi penelitian; kepada Ibu Sara N. Burdam, Ibu Dra. Mien D.E Roembiak, dr. Iras BP. Rumbiak, Bapak Samuel Burdam, sebagai penambah kelengkapan data; kepada Bapak Imanuel Burdam, Bapak Amos Swabra, Agustinus, sebagai pemandu ke lokasi penelitian, kepada Bapak John.K.H Roembiak, S.H,M.Hum., sebagai pendorong dan pendukung penelitian.

Terima kasih kepada Thomas Kaisiri, Agustinus Warikar, Bernard Amsamsyum, Gasper Mirino, Adolf Ayer, Tonci Msen, Pdt.E.Manjawaw, Yulius Msen, Thonny Kapisa, Yusuf Manpioper, Adam Swabra dan Amos Swabra di Yendidori atau Bar Mani. Terima kasih kepada Akovila Mandowen, Yoas Aim, Niko Ap, Obeta Sada, Saul Kararbo, Septianus Sanadi, Yerit Mofu, Demianus Ap, Felix Womsiwor, Apolos Awom, Otto Adadikam II, Demianus Andarek, Betuel Rumbewas, Decky Adadikam, Yan Pieter Adadikam, Demianus Wanma, Jeveth Ap, Naffali Awom, Abner Bonsapu, Ruland Bonggoibo, Otto Adadikam I, Nimrod Adadikam, Spenyel Krey, Melianus Daundi, Yeheskiel Abdidondifu, Lewi Abdidondifu, Ishak Wanma, Fedika, Yakob Rumbewas, Galvein Mofu, Alfius Adadikam di Biak Barat atau Bar Swandiwe. Terima kasih kepada Liku Yanis, Alex Korwa, Selas Kapetan, Stefanus Yembise, Senyel Kawiyan, Oktafianus Mambraku, Yosep Morin, Henah Yewun, Filex Wambramo, Orgenes Abidondifu, Arman Wanma, Zeth Baransano, Yermias Krey, Jonias mandowen, Fredy Rumbewas, Yustus baransano, Obeth Mandosir, Richard Awom, Yermias Krey, Noak Krey, Nikson Kawyan, Abner Sorbu, Terwanus Yembise, Matheus Rumbruren, Bastian Sorby, Markus Aulenius Awom, Yudhi Wanma, Abner Wamaer, Janias Mandowen, Bernard Komboy, Nikolaus Ayer, Simon Wanma, Thomas Krey, Elias Urbinas, Aser Awom, Seppy Rumbiak, Hendrik Wanma,

Herkanus Kapisa di Numfor Barat. Terima kasih kepada Adrinaus Dasem, Adrinaus Brabar, David Iryow, Piter Rumar, Bodewin Rumbrapuk, Cornelis Mambrasar, Wiliam Wabiser, Samuel F.J Wanperen, Filep Rumbrapuk, Hugo Rumwaropen, Lukas Rumaropen, Jan Noriwari, Hermilina Rumpaesum, Yan P. Pondayor, Andreas Morei, Jakob Brabar di Yewosi atau Bar Napa. Terima kasih kepada Zakarias Inur, Alberthina Bab, Klemens K. Rumsarwir, Zeth Korwa, Okt Rumsarwir, Obed J.Ansek, Melianus Rumaropen, Yuliana Kurni, Aron Kurni, Dolly Arompauw, Kores Yermia Dimara, Zakarias Rumpaipus, Micha Rumpumbo, Yorgen Faimbar, Yosua Mambiyar, Yosafat Womores, Salamon Warnares, Salmon Warnares, Adolof Warpur, Rensi Mambyeuw, Shane Kurni, Abigael Rumpaisum, Paulus Dimara, Jhon Rumansara, Yasrus Sarwamu, Samuel Mansmar di Biak Timur atau Bar Warmurem.

Nama-nama di atas merupakan tokoh-tokoh adat yang selama ini dengan penuh kebijaksanaan sekaligus ketegasan, mencoba untuk tetap melaksanakan, mentaati serta melestarikan hukum adat serta merasa terpanggil untuk membina generasi berikutnya agar tetap meneruskan hukum adat nenek moyang mereka.

Penulisan buku ini merupakan upaya untuk membantu masyarakat adat Biak yang ingin melestarikan hukum adat mereka melalui dokumentasi yang komprehensif dan mendalam. Semoga bantuan Tim penulis sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan kepentingan masyarakat adat Biak. Buku ini juga dapat dipergunakan bagi para mahasiswa dan pengajar, sebagai tambahan literatur dalam studi dan pengajaran hukum adat di Indonesia.

Buku tentang Hukum Adat Biak ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Pada Bab I diuraikan tentang latar belakang perlunya penulisan buku tentang Hukum Adat Biak, tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan buku tentang Hukum Adat, serta Keadaan Sosial dan Geografis Masyarakat Adat Biak. Bab II menguraikan tentang Beberapa Bidang dalam Hukum Adat. Pada Bab III, dideskripsikan tentang Hukum Ketatanegaraan Adat Biak. Selanjutnya pada Bab IV diuraikan tentang Kedewasaan Menurut Hukum Adat Biak. Bab V menjelaskan tentang hukum kekerabatan Adat Biak. Berikutnya, di dalam Bab VI akan dijabarkan mengenai hukum waris adat Biak. Bab VII berisi kajian tentang hukum pertanahan adat Biak. Di dalam Bab VIII dideskripsikan mengenai hukum delik adat Biak dan terakhir, di dalam Bab IX dijelaskan tentang eksistensi hukum adat Biak dalam pembangunan

hukum nasional.

Tim menyadari bahwa buku tentang Hukum Adat Biak ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk lebih sempurnanya penulisan buku Hukum Adat Biak ini. Pembaca juga tetap diharapkan dapat memperbandingkan dengan tulisan-tulisan yang ada tentang hukum adat Papua agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan benar. Semoga Tuhan senantiasa berkarya dalam panggilan kita masing-masing. Manseren ifnok Au!

Yogyakarta, Oktober 2010

Tim Penulis,

SAMBUTAN KEPALA BIRO HUKUM PROVINSI PAPUA



Dalam tatanan kehidupan masyarakat asli Papua, masih dipelihara norma-norma dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang beraneka ragam secara turun temurun diwariskan pada generasi-generasi baru dalam tatanan kehidupan itu sendiri. hal tersebut dapat terjadi bila generasi baru Papua berada dalam komunitas masyarakat hukum adat tersebut. Apabila generasi baru Papua berada di luar komunitas masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sudah tentu tidak akan memiliki pengetahuan dan atau pemahaman tentang nilai-nilai hukum adat yang diatur dalam kehidupan masyarakat adat nenek moyang mereka.

Generasi baru Papua akan tetap dapat memahami dan mengetahui hukum adat apabila hukum adat didokumentasikan dalam bentuk tulisan, sehingga akan terus terpelihara dalam kehidupan generasi Papua berikutnya, dimanapun mereka berada.

Penulisan buku “Hukum Adat Biak” ini dilatarbelakangi oleh pemikiran yang demikian sehingga dengan adanya buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi generasi penerus hukum adat Biak.

Penulisan awal hanya pada dua kelompok suku yaitu Biak dan Sentani (dalam buku yang terpisah), dengan harapan bahwa penyusunan hukum adat ke dalam sebuah buku ini dapat merangsang suku-suku lainnya di Papua untuk membukukan hukum adat mereka. Pemerintah Daerah/Kota semestinya berinisiatif memprakarsai proyek penyusunan buku hukum adat dan tidak menggantungkan pada insiatif Biro Hukum Provinsi semata-mata, sehingga pelaksanaannya lebih cepat dan tepat. Pekerjaan ini kecil tetapi manfaatnya jauh lebih besar.....

November, 2010,

JKH Roembiak

Karo Hukum Provinsi Papua

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah penduduk di setiap kecamatan	10
Tabel 2.	Jumlah tempat peribadatan	10
Tabel 3.	Jumlah pemeluk agama	11
Tabel 4.	Jumlah permohonan sertifikat hak atas tanah	12
Tabel 5.	Jumlah sertifikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan .	12
Tabel 6.	Luas Kawasan Hutan Lindung menurut fungsinya Tahun 2006	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kantor Dewan Adat Biak	39
Gambar 2.	Salah satu Kantor Kepala Kampung di Numfor Barat	41
Gambar 3.	Seorang Manawir Mnu di Bar Napa	47
Gambar 4.	Contoh Kankain Kakara Mnu	52
Gambar 5.	Mananwir Bar Napa sekaligus Ketua Peradilan adat Bar Napa	54
Gambar 6.	Contoh denda-denda adat: piring dan uang denda	55
Gambar 7.	Contoh-contoh kasus yang diperiksa dan diputus oleh Dewan Adat Biak	56
Gambar 8.	Contoh proses peradilan adat di Dewan Adat Biak	57
Gambar 9.	Rumah adat suatu keluarga	75
Gambar 10.	Contoh catatan proses penyelesaian pelanggaran adat	81
Gambar 11.	contoh <i>samfar</i> sebagai maskawin (dikenakan oleh peraga)	104
Gambar 12.	contoh piring kepala sebagai maskawin	104
Gambar 13.	contoh piring kepala dan piring kua (<i>manorkur</i>) sebagai maskawin	104
Gambar 14.	seorang figur tante yang berperan dalam peminangan	106
Gambar 15.	contoh kegiatan perempuan sebagai isteri: mencari kayu bakar	132
Gambar 16.	contoh kegiatan perempuan sebagai isteri: mencari kerang	132
Gambar 17.	alat musik tifa yang sering dipergunakan dalam upacara adat	135
Gambar 18.	contoh <i>karm'gu</i>	168
Gambar 19.	Contoh <i>yapur/yafdas</i>	168
Gambar 20.	Tanah, hutan, laut sebagai obyek hak ulayat	169

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pra Kata	iii
Sambutan Kepala Biro Hukum Propinsi Papua	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Isi	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang, Tujuan dan manfaat ditulisnya Buku tentang Hukum Adat Biak	1
B. Keadaan Sosial Geografis Masyarakat Adat Biak	6

BAB II. BEBERAPA BIDANG HUKUM ADAT

A. Pengertian Hukum Adat	15
B. Hukum Ketatanegaraan Adat	16
C. Hukum Kekeabatan Adat	20
D. Hukum Waris Adat	26
E. Hukum Tanah Adat	27
F. Hukum Delik Adat	31

BAB III. Hukum Ketatanegaraan Adat Biak

A. Hukum Ketatanegaraan Adat Masyarakat Adat Numfor	37
B. Hukum Ketatanegaraan Adat Masyarakat Adat Bar Napa	46
C. Hukum Ketatanegaraan Adat Masyarakat Adat Bar Warmoren	59
D. Hukum Ketatanegaraan Adat Masyarakat Adat Bar Mani	67
E. Hukum Ketatanegaraan Adat Masyarakat Adat Bar Swandiwe	73

BAB IV.	Kedewasaan Menurut Hukum Adat Biak	
	A. Kedewasaan Menurut Masyarakat Adat Numfor	89
	B. Kedewasaan Menurut Masyarakat Adat Bar Napa	91
	C. Kedewasaan Menurut Masyarakat Adat Bar Warmoren	93
	D. Kedewasaan Menurut Masyarakat Adat Bar Mani	97
	E. Kedewasaan Menurut Masyarakat Adat Bar Swandiwe	98
BAB V.	Hukum Perkawinan Adat Biak	
	A. Hukum Perkawinan Adat Numfor	101
	B. Hukum Perkawinan Adat Bar Napa	114
	C. Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Bar Warmoren	125
	D. Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Bar Mani	134
	E. Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Bar Swandiwe	145
BAB VI.	Hukum Waris Adat Biak	
	A. Hukum Waris Adat Numfor	157
	B. Hukum Waris Adat Bar Napa	158
	C. Hukum Waris Adat Bar Warmoren	159
	D. Hukum Waris Adat Bar Mani	160
	E. Hukum Waris Adat Bar Swandiwe	161
BAB VII.	Hukum Tanah Adat Biak	
	A. Hukum Tanah Adat Numfor	165
	B. Hukum Tanah Adat Bar Napa	186
	C. Hukum Tanah Adat Bar Warmoren	206
	D. Hukum Tanah Adat Bar Mani	221
	E. Hukum Tanah Adat Bar Swandiwe	237
BAB VIII.	Hukum Delik Adat Biak	
	A. Hukum Delik Adat Numfor	259
	B. Hukum Delik Adat Bar Napa	270
	C. Hukum Delik Adat Bar Warmoren	280

D. Hukum Delik Adat Bar Mani	286
E. Hukum Delik Adat Bar Swandiwe	290
BAB IX. Kedudukan Hukum Adat Biak dalam Pembangunan Hukum Nasional	
A. Kedudukan Hukum Adat Biak dalam Hukum Positif Indonesia	297
B. Kedudukan Hukum Adat Biak dalam Pembangunan Hukum Nasional	344
DAFTAR PUSTAKA	365
GLOSARY	373
INDEX	399

